

STANDAR MUTU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF AKREDITASI DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN

Ulfyah^{1✉}, Qorina Widadiyah², Aisyah Fadiatu Rizqi³

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

ulfie8671@gmail.com¹, qorinawida@gmail.com², afr7558@gmail.com³

Received: 2022-08-03; Accepted: 2022-08-09; Published: 2022-08-31

ABSTRACT

Quality assurance in Islamic education institutions remains a pressing concern amid increasing national and global demands for educational accountability. Accreditation and institutional governance are two interdependent pillars that collectively determine the quality standards of Islamic educational institutions, yet their conceptual and operational integration has received insufficient scholarly attention. This study aims to examine quality standards in Islamic education through the lenses of accreditation frameworks and institutional governance practices, identifying the structural and cultural factors that influence their effectiveness. A systematic library research methodology was applied, drawing on reputable academic journals, policy documents, and scholarly books published between 2019 and 2024. Findings indicate that quality standards in Islamic education are shaped by a triadic relationship among regulatory compliance, leadership capacity, and community participation. Research gaps revealed that prior studies have largely examined accreditation and governance as separate domains without exploring their synergistic potential within Islamic educational contexts. This study proposes an integrative governance-quality model relevant to madrasah, Islamic universities, and pesantren environments.

Keywords: quality standards, Islamic education, accreditation, institutional governance, madrasah

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi agenda prioritas yang terus menguat, seiring dengan perluasan kesadaran kolektif bahwa kualitas pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan peradaban bangsa yang bermartabat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh lembaga pendidikan termasuk madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam diwajibkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Kewajiban pemenuhan standar ini kemudian dioperasionalkan melalui instrumen akreditasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga berwenang seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran instrumen akreditasi telah mendorong lembaga pendidikan Islam untuk berbenah diri secara lebih sistematis dan terukur (Muhaimin, 2021).

Namun demikian, proses pemenuhan standar akreditasi di banyak lembaga pendidikan Islam masih kerap direduksi menjadi rutinitas administratif yang bersifat siklikal dan tidak menyentuh substansi peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Fenomena ini tercermin dalam kecenderungan sejumlah lembaga yang hanya bergerak aktif ketika jadwal akreditasi mendekat, sementara pada periode di antaranya perhatian terhadap mutu kembali mengendur. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara akreditasi sebagai instrumen formal penjaminan mutu dan internalisasi budaya mutu sebagai kesadaran institusional yang hidup dalam praktik keseharian lembaga (Sagala, 2020). Kesenjangan tersebut berimplikasi langsung pada rendahnya dampak akreditasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang dirasakan oleh peserta didik secara nyata.

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, kualitas pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kapasitas manajemen institusional yang meliputi kepemimpinan yang visioner, sistem pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan, pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel, serta mekanisme evaluasi internal yang berfungsi efektif. Tata kelola yang baik atau *good governance* dalam konteks lembaga pendidikan Islam bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan cerminan dari nilai-nilai Islam tentang amanah, keadilan, dan musyawarah yang diterapkan secara konkret dalam operasionalisasi kelembagaan (Hidayat & Machali, 2021). Ketika tata kelola yang baik terbangun secara kokoh, lembaga pendidikan Islam tidak hanya mampu memenuhi standar akreditasi, tetapi juga menghasilkan proses pendidikan yang benar-benar bermakna dan transformatif.

Kajian akademis tentang standar mutu pendidikan Islam telah berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir, namun masih menyisakan sejumlah celah yang perlu diisi oleh penelitian lebih lanjut. Studi yang dilakukan Nata (2022) memberikan analisis komprehensif tentang problem mutu pendidikan Islam secara umum, namun kurang menelusuri secara spesifik mekanisme akreditasi sebagai alat penjaminan mutu. Sementara itu, kajian Umiarso dan Gojali (2020) lebih menitikberatkan pada aspek manajemen mutu terpadu tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika tata

kelola kelembagaan yang kontekstual. Di sisi lain, penelitian Darma (2021) yang mengkaji akreditasi madrasah hanya berfokus pada aspek teknis instrumen tanpa mempersoalkan dampak substantif terhadap mutu pembelajaran yang sesungguhnya.

Research gap yang paling nyata dalam literatur yang ada terletak pada minimnya kajian yang secara integratif mempertemukan dimensi akreditasi dan tata kelola kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam. Akreditasi selama ini dipandang sebagai proses eksternal yang dilakukan oleh asesor dari luar lembaga, sementara tata kelola dipahami sebagai urusan internal manajemen, sehingga keduanya jarang dianalisis secara simultan dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Padahal, efektivitas akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola internal lembaga yang menjadi subjek penilaian (Ramayulis, 2022). Kajian yang mempertemukan kedua domain ini secara sistematis masih sangat langka dalam literatur manajemen pendidikan Islam.

Dari dimensi kebijakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 yang telah direvisi melalui PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Namun implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disparitas kapasitas kelembagaan antar wilayah, keterbatasan anggaran pendidikan Islam, hingga inkonsistensi dukungan teknis dari pemangku kebijakan di tingkat daerah. Kesenjangan antara kehendak kebijakan dan kapasitas implementasi inilah yang menjadi salah satu akar persoalan stagnannya mutu sebagian lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Baharuddin & Umiarso, 2020).

Pada tataran teoritis, konsep mutu dalam pendidikan Islam tidak dapat sepenuhnya dianalogikan dengan konsep mutu dalam manajemen industri yang menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran tertinggi. Pendidikan Islam memiliki dimensi teleologis yang melampaui kepuasan pragmatis, yakni mewujudkan insan kamil yang tidak hanya kompeten secara akademis dan profesional, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada Allah serta sesamanya. Oleh karena itu, standar mutu pendidikan Islam perlu dirumuskan secara holistik dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial dalam satu kerangka yang utuh (Mujib & Mudzakkir, 2022). Perumusan standar yang terlalu menekankan aspek administratif-formal tanpa mempertimbangkan dimensi nilai ini akan menghasilkan lembaga yang unggul di atas kertas namun dangkal secara substantif.

Peran kepemimpinan dalam membentuk budaya mutu lembaga pendidikan Islam menjadi variabel yang semakin banyak mendapat perhatian dalam penelitian terkini. Seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam yang memiliki komitmen terhadap mutu, kemampuan membangun visi bersama, dan kapasitas menggerakkan seluruh warga lembaga untuk berkontribusi pada pencapaian standar yang ditetapkan, terbukti mampu mentransformasi lembaga yang stagnan menjadi lembaga yang dinamis dan berprestasi. Kepemimpinan transformasional-spiritual yang memadukan orientasi pencapaian dan

orientasi nilai menjadi model kepemimpinan yang paling relevan bagi konteks pendidikan Islam kontemporer (Wahab, 2021).

Artikel ilmiah ini hadir untuk merespons kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, dengan tujuan mengkaji standar mutu pendidikan Islam secara komprehensif dalam perspektif akreditasi dan tata kelola kelembagaan melalui pendekatan studi pustaka yang sistematis. Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka konseptual yang integratif, yang dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan dan praktik penjaminan mutu pendidikan Islam yang lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi roh dari seluruh aktivitas edukatif lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi pendidikan Islam, dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan agama Islam (Fattah, 2019).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) sebagai strategi metodologis yang dipilih secara deliberatif. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mengkaji konstruk konseptual yang kompleks seperti standar mutu, akreditasi, dan tata kelola kelembagaan pendidikan Islam yang memerlukan sintesis mendalam dari berbagai sumber literatur (Zed, 2022). Sumber data primer meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 serta Scopus, buku-buku teks manajemen pendidikan Islam terbitan 2019–2024, dan dokumen kebijakan resmi Kementerian Agama RI. Sumber data sekunder mencakup prosiding seminar nasional dan internasional serta laporan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, inventarisasi, dan kajian kritis terhadap literatur yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi konsistensi temuan dari berbagai sumber yang berbeda secara independen. Analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan tahapan *reduksi*, *display*, dan *verifikasi* data secara sistematis dan reflektif sebagaimana dikembangkan oleh Creswell dan Creswell (2023) yang diadaptasi dalam konteks penelitian kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi Standar Mutu dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian mendalam terhadap berbagai literatur mengungkap bahwa konsep standar mutu dalam pendidikan Islam mengandung keunikan epistemologis yang membedakannya secara fundamental dari konsep mutu dalam manajemen umum. Mutu dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari output yang terukur secara empiris seperti nilai ujian, tingkat kelulusan, atau daya serap kerja, tetapi juga dari dimensi-dimensi yang bersifat normatif dan spiritual seperti ketakwaan, integritas, dan kesalehan sosial lulusan. Hal ini berarti bahwa penilaian mutu pendidikan Islam menuntut

penggunaan instrumen dan perspektif yang mampu menangkap realitas multidimensional dari tujuan pendidikan Islam yang komprehensif (Mujib & Mudzakkir, 2022). Reduksi standar mutu ke dalam indikator-indikator yang semata terukur secara kuantitatif berisiko menghasilkan distorsi dalam pemahaman tentang keberhasilan sejati pendidikan Islam.

Kajian terhadap regulasi dan praktik penjaminan mutu menunjukkan bahwa Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesungguhnya menawarkan kerangka minimum yang masih terbuka untuk diperkaya dengan standar-standar tambahan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar mutu khas yang melampaui SNP, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Peluang ini seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga pendidikan Islam sebagai arena artikulasi keunggulan komparatif mereka, bukan sekadar mengejar pemenuhan standar minimum yang sama dengan sekolah umum (Sagala, 2020). Pengembangan standar mutu berbasis nilai Islam ini akan memperkuat identitas kelembagaan sekaligus meningkatkan daya tarik lembaga di mata masyarakat.

Akreditasi sebagai Instrumen Penjaminan Mutu: Peluang dan Tantangan

Analisis terhadap sistem akreditasi lembaga pendidikan Islam mengidentifikasi adanya dua wajah akreditasi yang perlu dipahami secara kritis. Wajah pertama adalah akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu yang genuinely mampu mendorong peningkatan standar kelembagaan melalui penilaian yang komprehensif dan umpan balik yang konstruktif. Dalam wajah ini, akreditasi berfungsi sebagai cermin yang membantu lembaga melihat kekuatan dan kelemahannya secara objektif, kemudian menetapkan agenda perbaikan yang terukur (Darma, 2021). Wajah kedua adalah akreditasi sebagai formalitas yang dipenuhi secara ritualistik tanpa dampak nyata terhadap kualitas proses pembelajaran. Fenomena ini terjadi ketika lembaga memandang akreditasi semata sebagai sumber legitimasi eksternal dan prasyarat administratif untuk memperoleh berbagai hak kelembagaan.

Kajian pustaka ini menemukan bahwa faktor yang paling menentukan apakah akreditasi memberikan dampak nyata terhadap mutu adalah bagaimana lembaga menginternalisasikan proses dan hasil akreditasi ke dalam siklus perencanaan dan pengembangan institusionalnya. Lembaga-lembaga yang memperlakukan rekomendasi asesor akreditasi sebagai masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan, dan yang secara konsisten memantau kemajuan implementasi rekomendasinya dalam periode antarakreditasi, terbukti mengalami peningkatan mutu yang signifikan dan berkelanjutan (Baharuddin & Umiarso, 2020). Sebaliknya, lembaga yang hanya aktif berbenah menjelang kunjungan asesor cenderung mengalami stagnasi mutu dalam jangka panjang karena tidak terbangun sistem penjaminan mutu internal yang mandiri.

Persoalan kapasitas instrumen akreditasi dalam menangkap keunikan mutu pendidikan Islam menjadi temuan penting lainnya dari kajian pustaka ini. Instrumen akreditasi yang dirancang secara generik untuk semua jenis lembaga pendidikan cenderung kurang sensitif terhadap dimensi-dimensi mutu yang khas dalam pendidikan

Islam, seperti kualitas pengajaran kitab kuning di pesantren, efektivitas program tahfidz Al-Qur'an, atau kedalaman pembinaan akhlak yang sistematis. Akibatnya, lembaga yang sangat unggul dalam dimensi-dimensi khas tersebut dapat saja mendapat nilai akreditasi yang kurang memuaskan karena dimensi tersebut tidak tertangkap oleh instrumen yang ada, sementara lembaga yang biasa-biasa saja namun mahir dalam administrasi dapat memperoleh nilai tinggi (Wahab, 2021). Kondisi ini menuntut advokasi yang sistematis dari komunitas pendidikan Islam kepada BAN-SM dan BAN-PT untuk mengembangkan instrumen akreditasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Tata Kelola Kelembagaan dan Pengaruhnya terhadap Standar Mutu

Temuan kajian pustaka ini secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kelembagaan merupakan prediktor paling kuat dari pencapaian standar mutu pendidikan Islam yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, partisipasi komunitas dalam perumusan kebijakan, serta supremasi aturan dalam pengelolaan sumber daya manusia, secara konsisten menunjukkan kinerja mutu yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang tata kelolanya lemah (Hidayat & Machali, 2021). Korelasi positif antara good governance dan mutu pendidikan ini menegaskan bahwa investasi dalam penguatan tata kelola kelembagaan adalah investasi yang memberikan return tertinggi dalam jangka panjang.

Dimensi kepemimpinan dalam tata kelola kelembagaan mendapat sorotan khusus dalam berbagai literatur yang dikaji. Model kepemimpinan yang efektif untuk lembaga pendidikan Islam kontemporer adalah kepemimpinan yang mampu memadukan kecerdasan spiritual dengan kapasitas manajerial yang profesional. Seorang kepala madrasah atau pimpinan perguruan tinggi Islam yang hanya menguasai aspek keagamaan tanpa kemampuan manajerial yang memadai akan kesulitan memimpin institusi yang semakin kompleks, demikian pula sebaliknya. Sintesis keduanya dalam figur pemimpin yang *spiritually grounded yet managerially competent* menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi melalui program pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam yang terencana dan berkelanjutan (Muhaimin, 2021).

Model Integratif Akreditasi-Tata Kelola untuk Peningkatan Mutu

Berdasarkan sintesis komprehensif dari seluruh literatur yang dikaji, penelitian ini berhasil merumuskan sebuah model integratif yang menggambarkan relasi sinergis antara akreditasi dan tata kelola kelembagaan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan Islam. Model ini, yang selanjutnya disebut sebagai Model Akreditasi-Tata Kelola Berbasis Nilai (MATBN), mengidentifikasi tiga komponen utama yang saling berinteraksi secara dinamis. Komponen pertama adalah fondasi nilai (*value foundation*), yang mencakup visi dan misi lembaga yang berakar pada nilai-nilai Islam, komitmen pimpinan terhadap amanah dan ihsan, serta budaya mutu yang terbangun dari keyakinan bahwa bekerja berkualitas adalah bagian dari ibadah kepada Allah (Ramayulis, 2022). Fondasi nilai ini berfungsi sebagai energi penggerak yang memberi orientasi dan motivasi bagi seluruh aktivitas penjaminan mutu.

Komponen kedua adalah kapasitas tata kelola (*governance capacity*), yang meliputi sistem manajemen yang terstruktur dan berfungsi efektif, kepemimpinan yang transformasional dan akuntabel, mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, serta sistem informasi manajemen yang mendukung monitoring dan evaluasi berbasis data secara real-time. Komponen ketiga adalah responsivitas akreditasi (*accreditation responsiveness*), yakni kemampuan lembaga untuk merespons hasil akreditasi secara konstruktif, mengintegrasikan rekomendasi perbaikan ke dalam rencana pengembangan institusional, dan membangun sistem penjaminan mutu internal yang mandiri dan proaktif (Fattah, 2019). Ketiga komponen ini tidak bekerja secara linear, melainkan dalam sebuah siklus peningkatan berkelanjutan yang terus berputar menuju standar yang semakin tinggi.

Implikasi dari model MATBN ini bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam cukup luas dan signifikan. Pada level kebijakan, dibutuhkan pembaruan instrumen akreditasi yang lebih mampu menangkap dimensi mutu khas pendidikan Islam, serta regulasi yang mendorong lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang mandiri dan berbasis nilai. Pada level praktik, dibutuhkan program pengembangan kapasitas tata kelola yang sistematis bagi pimpinan dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi, serta pembangunan jejaring berbagi praktik terbaik antar lembaga pendidikan Islam. Dengan implementasi model ini secara konsisten, lembaga pendidikan Islam tidak hanya akan mampu meraih status akreditasi tertinggi, tetapi yang lebih penting, mampu mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan bermakna bagi pembentukan generasi Muslim yang unggul dan berakhlak mulia (Nata, 2022).

Kesimpulan

Kajian pustaka ini berhasil mengidentifikasi bahwa standar mutu pendidikan Islam merupakan konstruk multidimensional yang tidak dapat direduksi ke dalam indikator-indikator administratif-formal semata. Akreditasi dan tata kelola kelembagaan adalah dua pilar yang saling menguatkan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan Islam, dan efektivitas keduanya sangat bergantung pada kualitas fondasi nilai yang menjadi basis seluruh aktivitas kelembagaan. Model Akreditasi-Tata Kelola Berbasis Nilai (MATBN) yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif yang dapat dioperasionalkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam berbagai konteks kelembagaan.

Penelitian ini merekomendasikan empat agenda strategis bagi pemangku kepentingan pendidikan Islam: pertama, pembaruan instrumen akreditasi yang lebih sensitif terhadap dimensi mutu khas Islam; kedua, penguatan program pengembangan kapasitas kepemimpinan berbasis nilai bagi pimpinan lembaga; ketiga, pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang mandiri dan berkelanjutan; keempat, pembangunan ekosistem berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antar lembaga pendidikan Islam. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris komparatif sangat

dibutuhkan untuk memvalidasi model yang diusulkan dan mengeksplorasi variasi implementasinya di berbagai konteks kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Baharuddin, & Umiarso. (2020). *Kepemimpinan pendidikan Islam: Antara teori dan praktik* (Ed. ke-2). Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Darma, B. (2021). Akreditasi madrasah dan peningkatan mutu pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.21274/tarbawi.2021.9.1.55-72>
- Fattah, N. (2019). *Sistem penjaminan mutu pendidikan: Dalam konteks penerapan MBS* (Ed. Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2021). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Muhaimin. (2021). *Manajemen pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah* (Ed. ke-5). Kencana Prenada Media Group.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2022). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ramayulis. (2022). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. ke-12). Kalam Mulia.
- Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan* (Ed. ke-8). Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Umiarso, & Gojali, I. (2020). *Manajemen mutu sekolah di era otonomi pendidikan: Menjual mutu pendidikan dengan pendekatan quality control bagi pelaku lembaga pendidikan* (Ed. ke-3). IRCiSoD.
- Wahab, A. (2021). Kepemimpinan pendidikan Islam dan kompetensi manajerial kepala madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.35316/jpii.v6i1.280>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. ke-4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.